

**PELEMBAGAAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2019 – 2022**

***INSTITUTION OF PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) OF WEST SUMATRA
PROVINCE 2019 – 2022***

Arifwendri Pratama¹, Andri Rusta², Tamrin³
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
arifpratama880@gmail.com

Abstrak: Peningkatan peroleh suara atau kursi yang diperoleh partai politik dapat dilihat dari pelembagaan yang baik dari partai politik. Sehingga sudah menjadi suatu keharusan bagi partai politik untuk meningkatkan kualitas organisasinya terutama di internal agar memiliki nilai tawar yang lebih bagi masyarakat. Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu partai yang konsisten berada di empat besar dan memperoleh kursi pimpinan DPRD Sumatera Barat. Tidak hanya itu PAN Sumatera Barat juga mengalami peningkatan kursi secara berturut turut dari tiga periode dari 2009-2019 dengan memperoleh 10 kursi. Fenomena ini menimbulkan asumsi dari peneliti bahwa peningkatan yang diperoleh oleh PAN Sumatera Barat pada Pemilihan Legislatif Sumatera Barat 2019 adanya pelembagaan yang baik dari Partai Amanat Nasional Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis tentang pelembagaan Partai Amanat Nasional serta pengaruh pelembagaan PAN terhadap peningkatan perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legislatif DPRD Sumatera Barat tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan type Studi Kasus, dengan menggunakan teori pelembagaan politik dari Samuel Huntington dengan melihat kepada empat indikator kemampuan (*Adaptability, Complexity, Coherence, Autonomy*). Hasil dari temuan peneliti menunjukkan bahwa peningkatan perolehan kursi yang dialami Partai Amanat Nasional Sumatera Barat selama tiga periode pemilihan legislatif dari 2009-2019 karena adanya pelembagaan partai yang baik terutama karena kesamaan latar belakang Muhamadiyah yang menjadikan PAN Sumatera Barat menjadi solid, apalagi Sumatera Barat yang dominan Muhammadiyah, selain itu juga ada pengaruh kader kader yang berpengalaman yang terus diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan Bersama.

Kata kunci : *Pelembagaan, Partai Amanat Nasioanl, Pemilihan Legislatif,*

Abstract : The increase in votes or seats obtained by political parties can be seen from the good institutionalization of political parties. So that it has become a must for political parties to improve the quality of their organizations, especially internally so that they have more bargaining value for the community. The West Sumatra Province National Mandate Party is one of the parties that has consistently been in the top four and won the seat of the West Sumatra DPRD leadership. Not only that, the West Sumatra PAN also experienced an increase in seats in a row from three periods from 2009-2019 by obtaining 10 seats. This phenomenon raises the assumption from researchers that the increase obtained by the West Sumatran PAN in the 2019 West Sumatra Legislative Elections was due to good institutionalization of the West Sumatran National Mandate Party. The purpose of this study is to explain and analyze the institutionalization of the National Mandate Party and the effect of PAN institutionalization on increasing the seat acquisition of the National Mandate Party (PAN) in the West Sumatra DPRD legislative election in 2019. This study uses a qualitative approach with Case Study type, using institutionalization theory. politics of Samuel Huntington by looking at the four indicators of ability (*Adaptability, Complexity, Coherence, Autonomy*). The results of the research findings indicate that the increase in seat gains experienced by the West Sumatra National Mandate Party during the three legislative election periods from 2009-2019 was due to

good party institutionalization, especially because of the similarity of Muhammadiyah background which made the West Sumatran PAN solid, especially West Sumatra which was dominant. Muhammadiyah, besides that there is also the influence of experienced cadres who continue to be trusted by the people to fight for the common interest.

Keywords: *Institutionalization, National Mandate Party, Legislative Election*

A. PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik menjadi salah satu aspek penentu yang dapat memastikan jalannya sistem demokrasi, karena dengan tidak adanya partai politik demokrasi bagaikan kereta tanpa kepala atau dengan kata lain sistem demokrasi tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Karena pada pelaksanaannya tidak ada demokrasi tanpa partai politik, karena sejatinya partai politik dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan demikian, sejauh mana sistem demokrasi ditentukan oleh tingkat kualitas partai politik yang menciptakannya. Dimana kualitas parpol erat kaitannya dengan proses pelebagaan. Dalam konteks ini, pelebagaan partai politik merupakan bagian dari upaya untuk memastikan demokrasi dijalankan oleh partai politik yang berkualitas¹. Pada saat yang sama, menurut Huntington, pelebagaan adalah proses dimana organisasi melakukan proses (prosedur) untuk mendapatkan nilai yang stabil. Atau dalam pengertian lain menurut Randall dan Lars, pelebagaan dijelaskan sebagai proses bagi partai menjadi stabil terutama dalam hal pola perilaku yang terintegrasi dengan sikap dan budaya.²

Tidak hanya itu pelebagaan partai politik ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dari partai politik, terutama untuk menanggapi setiap permasalahan yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal. Kapabilitas partai dalam menyelesaikan masalah-masalah internal serta merespons berbagai tuntutan dapat memberikan dampak terutama untuk membangun loyalitas dan memperluas basis dukungan dari partai itu sendiri.³ Oleh sebab itu betapa pentingnya pelebagaan partai politik untuk ditekankan, terutama untuk memperkuat dan memaksimalkan struktur dari kelembagaan partainya untuk memperoleh suara dari para konstituennya sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan pada kontestasi pemilu dan memperoleh kursi di parlemen.

Partai Amanat Nasional adalah salah satu dari enam belas partai yang terdaftar dan lolos verifikasi KPU untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Umum Serentak pada 2019 lalu. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan perolehan kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ketiga kalinya secara beruntun dari tiga periode sebelumnya pada tahun 2009-2014 dengan 6 kursi, 2014-2019 dengan 8 kursi dan tahun 2019-2024 dengan perolehan 10 kursi. Tidak hanya sampai disitu tren positif PAN Provinsi Sumatera Barat berlanjut pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dengan sukses mengantarkan 8 pasangan kepala daerah unggul di Pilkada Provinsi Sumatera Barat, dan 5 orang diantaranya adalah kader asli PAN sendiri.

Berdasarkan Tren positif yang dialami PAN Provinsi Sumatera Barat ini peneliti berasumsi bahwa Peningkatan yang diperoleh oleh PAN Sumatera Barat menandakan adanya pelebagaan partai yang cukup baik ditujukan oleh DPW PAN Sumatera Barat. Oleh karena itu penulisan ini dirumuskan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pelebagaan Partai Amanat Nasional serta pengaruh pelebagaan PAN terhadap

¹ Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization and the New Democracies, ECPR Joint Session of Workshop", 26-31 Maret 1999, Mannheim: ECPR, hal. 9-10

² *Ibid.*,

³ Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yarma Widya. Hlm. 36.

peningkatan perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legislatif DPRD Sumatera Barat tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode kualitatif adalah sebuah cara yang menghasilkan sebuah data yang bersifat deskriptif berupa dari kata-kata tertulis, lisan dari informan dan dapat dilihat dari perilaku yang masyarakat diamati,⁴ dimana peneliti ingin melihat dan mendapatkan pengetahuan lebih lanjut untuk memahami dan menjelaskan tentang faktor pelebagaan yang menyebabkan peningkatan perolehan kursi yang dialami Partai Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2009 hingga 2019 yang lalu. Dengan menggali informasi dari pengurus wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara langsung. Peneliti ingin mengetahui tentang pelebagaan Partai Amanat Nasional serta pengaruh pelebagaan PAN terhadap peningkatan perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legislatif DPRD Sumatera Barat tahun 2019.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelebagaan partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai di tengah tumbuh dan berkembangnya partisipasi politik. Oleh sebab itu betapa pentingnya pelebagaan partai politik untuk ditekankan, terutama untuk memperkuat dan memaksimalkan struktur dari kelembagaan partainya untuk memperoleh suara dari para konstituennya sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan pada kontestasi pemilu dan memperoleh kursi di parlemen. Partai politik dengan kemampuan adaptasi yang baik dapat terus tumbuh dan berkembang, namun sebaliknya, partai-partai yang tidak mengikuti perkembangan politik akan kalah dalam menghadapi persaingan politik yang semakin ketat. Sehingga mau tidak mau partai politik memang sudah seharusnya memperhatikan tingkat pelebagaan partai demi mendukung demokratisasi dan menjamin partai untuk terus eksis dan bertahan dalam kontestasi politik dimasa yang akan datang.

Terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 lalu, yang mana pemilihann legislatif berbarengan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang tentunya sekaligus menjadi tantangan untuk setiap partai. Terutama fenomena yang dialami oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat yang untuk ketiga kalinya secara beruntun mengalami peningkatan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu peneliti melihat peningkatan perolehan kursi yang diraih oleh PAN Sumatera Barat karena adanya pelebagaan yang baik dari PAN Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Peneliti sendiri menggunakan teori pelebagaan partai politik dari Samuel Huntington sebagai pisau analisis dalam membedah serta menganalisis fakta yang ada dilapangan. Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan pada bagian teori di bab sebelumnya, dengan melihat kepada empat aspek kemampuan yaitu; *Adaptability, Complexity, Coherence, Autonomy*.⁵

⁴ lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT Remaja Rosdakarya. 2002. hal, 3

⁵ Huntington, Samuel. 1973. *Political Order in Changing Societies*. New York: Yale University Press.

1. *Adaptability* (Kebiasaan)

Kemampuan adaptasi yang dimaksud huntington dalam teori ini tidak hanya sebatas larut dalam tekanan lingkungan eksternal atau luar partai, melainkan juga partai diharapkan untuk mampu membaca setiap gejala perubahan dilingkungan eksternal partai dan mampu beradaptasi secara internal untuk menyesuaikan dengan arus perubahan lingkungan eksternal yang sesuai dengan nilai - nilai partai agar tujuan dari partai dapat terwujud, dengan melihat kepada tiga tolak ukur: usia partai, usia generasi dan terakhir ada fungsi. Untuk indikator *Adaptability* ini langkah yang dilakukan oleh PAN Sumatera Barat itu menyesuaikan setiap periode pemilihan dengan isu-isu terkini yang beredar. Dengan begitu partai akan merasa dekat dengan para konstituennya, hal inilah yang nantinya akan menjadi point plus bagi partai. Dengan partai yang menyesuaikan dengan kebutuhan pemilih akan membuat suara partai akan naik.

Tidak sampai disitu saja, partai yang sudah terlembaga tidak hanya dilihat dari penyesuaian terhadap lingkungan eksternal saja, melainkan juga penyesuaian terhadap lingkungan internal partai, melainkan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan internal dalam persiapan untuk mengikuti kontesasi politik. Karena dengan berbenah di tingkat internal akan membuat partai akan dewasa secara internal, dengan salah satu cara melengkapi administrasi di setiap tingkatan. Karena dengan demikian akan memunculkan tokoh-tokoh kader potensial dan berpengalaman yang sudah teruji di tengah-tengah masyarakat

2. *Complexity* (Kompleksitas)

Kemampuan kompleksitas ini Huntington menuturkan bahwa semakin terpadunya sebuah organisasi akan semakin tinggi tingkat pelembagaannya. Sehingga dengan adanya kompleksitas akan memungkinkan suatu partai untuk memaksimalkan segala perbedaan yang muncul dari basis dukungan partai tersebut, baik itu perbedaan kepentingan, keragaman nilai, maupun latar belakang yang beragam. Pada indikator ini dapat dilihat bahwa PAN Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari sekian banyak partai yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Dapat dilihat pada tingginya tingkat kelembagaan di tubuh Partai Amanat Nasional yang memiliki banyak sub-unit dalam kepengurusan partai, tidak terkecuali Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang juga banyak memiliki sub-unit dalam kepengurusan partai yang diisi oleh warga negara yang terdiri dari berbagai lapisan atau kalangan dan terdiri dari berbagai kepentingan yang berbeda. Dengan begitu akan membentuk solidaritas sesama kader yang terjalin di internal Partai Amanat Nasional Sumatera Barat terutama untuk dapat mewujudkan tujuan partai.

3. *Coherence* (Kesatuan)

Pada indikator kemampuan koherensi ini melihat sejauh mana partai dapat mentoleransi dan menetralkan perselisihan dan perbedaan pandangan dalam internal partai. Karena koherensi bertujuan dalam menyelaraskan tujuan dan arah partai. Selain itu koheren merupakan salah satu batu loncatan sebuah partai, terutama membentuk rasa solidaritas di antara kader dan anggota partai, karena koherensi menurut Huntington Semakin terpadu dan utuh suatu organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya. Partai Amanat Nasional terutama Wilayah Sumatera Barat bisa dikatakan partai yang cukup memiliki solidaritas antar sesama kader yang tinggi dengan berlatar belakang basis partai Muhammadiyah yang bisa dikatakan besar dan kuat untuk wilayah Sumatera

Barat, dan hasilnya yang ditandai dengan pencapaian Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang selalu mendapatkan kursi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga mengalami peningkatan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2009-2019. Pencapaian yang diperoleh oleh DPW PAN Provinsi Sumatera Barat ini tentu buah dari kerja keras dari para kader yang memiliki rasa solidaritas dan kesatuan yang tinggi, sehingga mampu memperoleh hasil yang memuaskan. Pencapaian yang diperoleh oleh DPW PAN Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari usaha keras semua kader dengan rasa solidaritas yang tinggi untuk mewujudkan tujuan partai, dengan adanya monitoring dan evaluasi adalah salah satu bentuk keterbukaan partai yang dilakukan oleh pimpinan wilayah untuk menjalankan roda organisasi dan menunjukkan kalo PAN tidak dikuasi oleh elite elite partai, mengingat untuk wilayah Sumatera Barat Basis Muhamadiyah yang merupakan basis terbesar PAN, sehingga tidak sulit untuk PAN menjalin silaturahmi antar sesama kader dan konstituen karena dengan adanya keterbukaan yang ditekankan oleh PAN Sumatera Barat.

4. *Autonomy (Otonomi)*

Kemampuan Otonomi menunjukkan kemandirian partai dalam menentukan sikap politik tanpa tekanan atau pengaruh dari lingkungan luar. Di sisi lain, pelembagaan partai dari sudut pandang otonomi juga menunjukkan kebebasan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan sikap politik sebagai ekspresi nilai dan identitas partai. yang berbeda dari partai lain. Dengan kata lain, otonomi ini akan membuat suatu partai menjadi mandiri secara kelembagaan dan bebas dari campur tangan pihak luar. Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kemandiriannya dalam pengambilan setiap keputusan itu melibatkan seluruh kader partai, mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah dan wilayah. Dengan demikian akan menghasilkan beberapa masukan di masing masing daerah, karena tentu setiap keputusan yang lahir nantinya tentu harus bermanfaat untuk setiap wilayah sumatera barat yang juga memiliki kepentingan yang berbeda, setelah hasil final di dapat barulah yang akan diterapkan Bersama.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pemilihan Legislatif tahun 2019 terutama untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat menjadi capaian tren positif yang diraih oleh Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya untuk ketiga kalinya dalam periode pemilihan legislatif tingkat Provinsi Sumatera Barat Partai Amanat Nasional selalu mengalami peningkatan perolehan suara, yang berdampak pada peningkatan perolehan kursi. Adanya peningkatan perolehan kursi yang diraih oleh Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019 tentu ada penyebabnya, sebagaimana tujuan penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tentang pelembagaan Partai Amanat Nasional serta pengaruh pelembagaan PAN terhadap peningkatan perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legislatif DPRD Sumatera Barat tahun 2019 melalui teori pelembagaan partai menurut Samuel P Huntington yang melihat pelembagaan sebagai suatu proses dimana organisasi dengan tata caranya untuk memperoleh nilai baku dan stabil, dimana didalamnya terdapat empat indikator untuk menggambarkan unsur pelembagaan itu, berikut diantaranya: *Adaptability, Complexity, Coherence* dan *Autonomy*.

Pertama pada Adaptability atau penyesuaian diri, Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat merupakan partai lama dan secara usia juga sudah matang dan juga telah mengikuti lima periode pemilihan umum dengan berbagai system yang baru sehingga untuk penyesuaian dari PAN Sumatera Barat sendiri itu sangat baik dalam menyesuaikan dengan setiap isu yang beredar sehingga tidak merubah cirikhas partai dalam menyikapi setiap isu yang beredar disetiap pemilu

Kedua yaitu Complexity PAN yang punya karalteristk yang berbeda dari partai lain dimana relatif terbuka tidak ada dominasi dari elite partai, sehingga adanya kesetaraan ditubuh PAN Sumatera Barat.

Indikator *Ketiga* yaitu Coherence, penyebab peningkatan perolehan kursi dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari kesolidan sesama kader partai, terutama sesama kader partai yang tidak hanya berhubungan di dalam partai melainkan juga punya hubungan keorganisasian yaitu Muhammadiyah yang semakin memperkuat kesolidan antar sesama kader partai. Tidak hanya itu indikator ini juga terlihat pada Partai Amanat Nasional partai yang terbuka

Sedangkan indikator *Keempat* yaitu Otonomi dapat dilihat dari kemandirian Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan sikap politik atau arah partai tanpa ada tekanan dari pihak luar, salah satunya dalam penentuan calon presiden pilihan PAN, dimana DPW PAN Sumatera Barat dalam menentukan siapa calon presiden pilihan PAN Sumatera Barat itu menjangring aspirasi dari tingkat bawah mulai dari musyawarah dari tingkat ranting, cabang, daerah dan barulah disepakati nanti di tingkat wilayah. Hal ini adalah salah satu bentuk kemandirian PAN Sumatera Barat, tanpa adanya intervensi atau desakan dari pihak luar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem*

Kepartaian. Bandung: Yarma Widya. Hlm. 36.

Huntington, Samuel. 1973. *Political Order in Changing Societies*. New York: Yale University Press.

lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:PT Remaja Rosdakarya. 2002. hal,

3

Vicky Randall dan Lars Svasand, "*Party Institutionalization and the New Democracies*, *ECPRJoint*